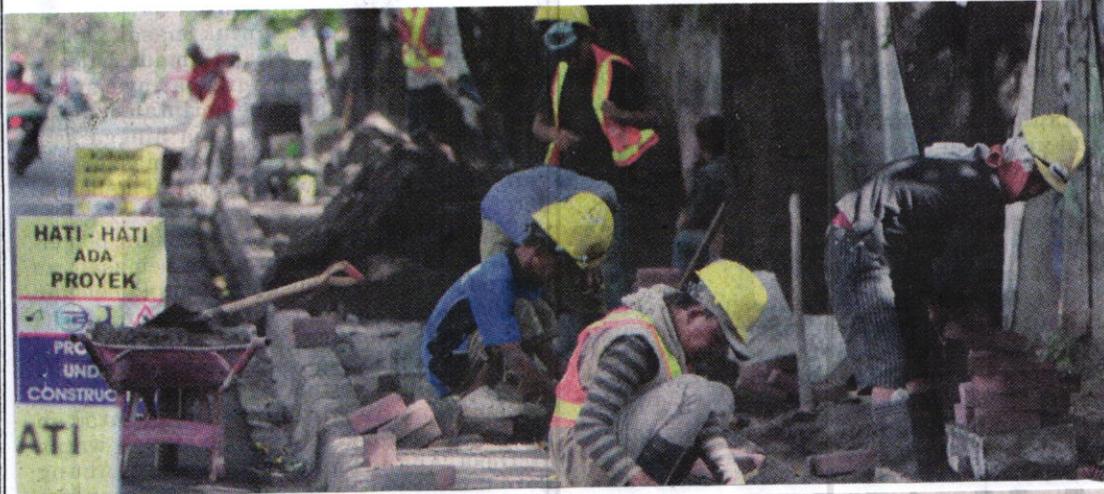




# Dewan Soroti Perbaikan Trotoar Jalan Dewi Sartika

**TROTOAR** - Beberapa pekerja tengah memperbaiki trotoar di Jalan Dewi Sartika, Denpasar, Selasa (26/5) kemarin. Perbaikan trotoar tersebut merupakan proyek pemeliharaan berkala jalan provinsi dengan anggaran dana bersumber dari APBD.



Denpasar (Bali Post) - Perbaikan trotoar di Jalan Dewi Sartika, Denpasar menuai keluhan. Pasalnya, perbaikan tersebut hanya memoles di luarnya. Sedangkan saluran air di bawahnya tidak ditangani dengan baik. Bahkan, tidak ada pengerukan, sehingga dikhawatirkan perbaikan trotoar tersebut menjadi mubazir.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi III DPRD Denpasar A.A. Susruta Ngurah Putra di kantornya, Selasa (26/5) kemarin. Pihaknya prihatin dengan pola pengerjaan trotoar yang hanya menempel paving blok di atas trotoar lama. "Semestinya, sebelum perbaik-

kan dilakukan pengerukan, sehingga ketika musim hujan, fungsi drainase tersebut bisa lebih maksimal," ujar politisi Demokrat ini.

Susruta menyayangkan pengerjaan trotoar di sepanjang Jalan Dewi Sartika yang kini sedang berlangsung, hanya

mikian. Pola pengerjaan yang tidak diawali dengan pengerukan alur air di bawahnya, dikhawatirkan akan mubazir. Ketika hujan turun, air akan tetap meluap di jalan, karena saluran drainasenya tersumbat sampah dan juga ada pendangkalan. "Sebenarnya saat ini momen yang tepat untuk melakukan pengerukan drainase akibat terjadi pendangkalan, sehingga ketika musim hujan tiba, fungsi drainase berjalan optimal. Air pun

main tumpuk. Berbeda dengan pengerjaan trotoar di Jalan Surapati yang telah rampung. Kalau di jalan itu, memang ada perbaikan di saluran bawahnya, sehingga ketika hujan, air mengalir dengan baik.

Namun, pengerjaan trotoar di Jalan Dewi Sartika tidak de-

akan mengalir dengan baik dan tidak meluber di jalan," ujar Susruta.

Kepala Dinas PU Kota Denpasar I Ketut Winarta yang dikonfirmasi mengatakan, proyek perbaikan trotoar di jalan itu dikerjakan oleh provinsi. Pihaknya sudah sempat berkoordinasi terkait pengerukan di bawahnya. "Kami sudah koordinasikan dengan provinsi untuk dilakukan pengerukan," katanya. (kmb12)

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 9



## Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di Denpasar

# Giliran Kabag Keuangan Setwan Diperiksa Kejari

Denpasar (Bali Post) -

Sesuai jadwal yang sudah diagendakan, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kembali memeriksa saksi atas dugaan korupsi perjalanan dinas di Pemkot Denpasar. Selasa (26/5) kemarin, giliran Kabag Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan) Denpasar Made Suwirta dan Kasubag Perbendaharaan Ni Made Ardani diperiksa tim penyidik.

Mereka tiba di kantor Kejari Denpasar pimpinan Imanuel Zebua pada pukul 09.00 wita. Suwirta diperiksa jaksa Gusti Widana dan Ardani diperiksa oleh jaksa Lumi Sendi. Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir mengatakan, mereka diperiksa terkait dengan tugas pokok dan fungsi, khususnya soal perjalanan dinas.

Syahrir juga mengatakan, pemeriksaan dilakukan

secara maraton. Bahkan nantinya jika ada saksi yang sebelumnya sudah diperiksa namun diperlukan ketertinggalannya, akan dipanggil kembali. Selain di salah satu ruangan, jaksa penyidik tampak membeber sejumlah data. Data tersebut nantinya dipilah-pilah sesuai yang dicari yang berkaitan dengan kasus ini.

Sebelumnya, dua saksi yang diperiksa adalah pejabat teknis Sekretariat Dewan. Mereka adalah Kabag Perundang-undangan yang juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di DPRD Kota Denpasar Gusti Made Patra dan mantan Kasubag Kerja Sama dan Fasilitas DPRD Kota Denpasar yang saat ini Kepala UPT Pengelola Gedung Sewaka Dharma Gede Wira Kusuma. Patra diperiksa di lantai dua Kejari Denpasar dengan jaksa pemeriksa Luga Herlianto.

Sedangkan Gede Wira diperiksa di Posko Bantuan Hukum Kejari Denpasar.

Informasi yang didapat, saksi dari PPTK membawa tambahan data sebanyak dua kardus. Data tersebut berkaitan dengan proses teknis pelaksanaan perjalanan dinas tahun 2013. Isi data itu, dari proses penunjukan travel yang jadi rekanan sampai rekap laporan penggunaan anggaran. Hal tersebut dibenarkan Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir. Dia mengatakan, tambahan data itu bisa membantu penyidik dalam menelusuri dan membongkar penggunaan anggaran perjalanan dinas di Pemkot Denpasar. (kmb37)

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 3



## Gaji Perangkat Desa Dirapel

Singaraja (Bali Post) –

Menyusul molornya pencairan naskah para perangkat desa, membuat pemerintah daerah terus berupaya agar gaji bulanan perangkat desa segera cair. Tertundanya pencairan naskah hingga lima bulan ini bukan karena unsur kesengajaan, tetapi kondisi ini terjadi akibat penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan perubahan aturan hukum yang lainnya. Namun, pemerintah daerah menjamin dalam waktu dekat ini, naskah perangkat desa di Bali Utara akan bisa dibayarkan dengan sistem rapel.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Buleleng Gede Sandhiyasa didampingi Kabag Humas dan Protokol Sekkab Buleleng Made Supartawan Selasa (26/5) kemarin.

Lebih jauh Sandhiyasa mengatakan, menyusul berlakunya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pembayaran naskah perangkat desa dari semula dalam bentuk Tunjangan Perangkat Pemerintahan Desa kini diubah menjadi penghasilan tetap (siltap). Bukan hanya istilah yang berubah, namun pembayaran naskah perangkat desa ini juga berubah dan terkesan ribet. Sandhiyasa mencontohkan, pembayaran naskah perangkat desa ditentukan berdasarkan persentase dana desa yang diterima masing-masing desa. Desa yang menerima dana desa di atas Rp 900 juta persentase siltap ditetapkan 30 persen. Desa yang menerima dana desa dari Rp 700 juta hingga Rp 900 juta persentase siltap sebesar 40 persen. Desa yang menerima dana desa dari kisaran Rp 500 juta hingga Rp 700 juta persentase siltap sebesar 50 persen. Sedangkan desa

yang menerima dana desa di bawah Rp 600 juta, persentase siltap sebesar 60 persen. Persentase siltap ini akan dijadikan acuan untuk menghitung nilai naskah perangkat desa. Dengan pola ini risikonya desa yang menerima dana desa dengan nilai besar namun jumlah perangkat desa gemuk, maka otomatis siltapnya akan semakin kecil. Sebaliknya desa yang minim perangkat dan jatah dana desanya juga minim, siltapnya akan lebih besar karena pembagiannya sedikit. Sehingga naskah yang akan dibayarkan otomatis akan lebih besar. "Seperti itu perhitungannya dan ini sudah kita sosialisasikan. Desa yang memang gemuk perangkat desanya dan siltapnya kecil yang otomatis naskah akan kecil, namun akan bisa ditutupi dari dana tunjangan yang mereka terima," katanya. (kmb38)

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 13



## Kabid Jadi Tersangka Program Bina Marga Terancam Mandek

Singaraja (Bali Post) -

Penyidikan dugaan kasus korupsi proyek di Desa Lemukih Kecamatan Sawan yang menyeret Made Suwitra, dikhawatirkan berdampak pada program Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng. Pasalnya, Suwitra yang masih menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga resmi ditahan di Rutan Singaraja sejak Kamis (21/5) pekan lalu.

Sebelumnya, yang bersangkutan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek fisik di bidang Bina Marga Dinas PU Buleleng. Bukan hanya program pelaksanaan terancam mandek, namun penahanan itu juga berbuntut pada terancamnya proses pembayaran tahapan proyek yang sudah dikerjakan oleh rekanan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng, Nyoman Gede Suryawan, ketika ditemui di lobi kantor Bupati Selasa (26/5) kemarin, tidak menampik kalau tugas-tugas di Bidang Bina Marga mulai mandek setelah anak buahnya itu ditahan karena terlibat dugaan kasus korupsi. Lebih jauh, Suryawan mengatakan, sebelum Suwitra ditahan, pekerjaan yang menjadi tugas-tugas dinas masih bisa dikerjakan dengan baik. Namun, pascapenahanan itu, tugas-tugas yang diemban oleh yang bersangkutan mulai mandek.



Bali Post/mud

*Nyoman Gede Suryawan*

Apalagi, dalam tahun anggaran 2015 ini, Suwitra yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga sekaligus ditunjuk sebagai PPK untuk pelaksanaan proyek fisik di Dinas PU Buleleng. Bahkan, saat ini beberapa proyek fisik yang sudah berjalan itu sekarang ini memasuki pada tahapan (termin) pembayaran pekerjaan sesuai kontrak

dengan pihak rekanan. Tak pelak, situasi ini bisa saja akan mengganggu pelaksanaan proyek lain di Dinas PU jika situasi ini tidak segera diambil langkah serius. "Sangat terasa dampaknya karena yang bersangkutan menjadi PPK kegiatan di PU dan kalau tidak diambil langkah penanggulangan, kami khawatir program di dinas akan mendek, karena rekan kami menghadapi persoalan hukum," tegasnya.

Mencegah jangan sampai kasus ini menghambat kegiatan fisik di Dinas PU, Suryawan secepatnya akan menghadap Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Pihaknya akan melaporkan terkait kondisi di Bidang Bina Marga setelah kabidnya ditahan karena kasus dugaan korupsi. Kepada Bupati, dia akan meminta petunjuk lebih lanjut agar tugas-tugas dinas di Bidang Bina Marga tetap bisa berjalan seperti biasa. (kmb38)

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 13



## Kasus Korupsi Pipanisasi di Karangasem Tersangka Mantan Kepala Divisi Adhi Karya Dilimpahkan

Denpasar (Bali Post) -

Satu per satu tersangka dugaan korupsi pipanisasi di Karangasem dilimpahkan pada kejaksaan guna dilanjutkan pada proses persidangan. Setelah Arnawa dan mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Karangasem yang kini menjabat Asisten II Sekda Karangasem Ir. Ida Bagus Made Oka, Selasa (26/5) kemarin Polda Bali melimpahkan berkas dan tersangka mantan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya Bali (Persero) Tbk. Ir. Wijaya Imam Santoso.

Saat tiba di Kejati Bali siang kemarin, tersangka terlihat dikawal petugas kepolisian yang membawa senjata laras panjang. Sebab, kini tersangka ditahan di Lapas Kerobokan karena dia juga tersangkut korupsi di PT Adhi Karya yang dibidik Kejaksaan Agung RI. Mengingat locus deliktinya di Karangasem, pascadilakukan tahap II (pelimpahan barang bukti, berkas dan tersangka) ke Kejatai Bali, dari Kejati Bali di bawah komando Kasi Penuntutan Kejati Bali Made Arthana, tersangka dilimpahkan ke Kejari Karangasem. "Ya, sekarang tahap II-nya. Saya sendiri yang akan ikut ke Karangasem," ujar Kasi Penuntutan Arthana sesaat sebelum berangkat ke Karangasem.

Sebelumnya, dalam persidangan dengan terdakwa Arnawa, tersangka Imam ditengarai mengetahui persis soal dugaan korupsi pipanisasi. Apalagi, dia akhirnya dijadikan pemenang lelang dalam proyek senilai Rp 29 miliar tersebut. Sehingga dalam putusan majelis hakim, Arnawa tidak dibebankan uang pengganti melainkan akan dibebankan pada pihak Adhi Karya.

Iman Wijaya juga pernah dihadirkan di Pengadilan Tipikor untuk dijadikan saksi atas terdakwa Arnawa kala itu. Dalam perkara korupsi pipanisasi ini, negara dirugikan senilai Rp 3,7 miliar. Selain Iman Wijaya, Parno Tris Hadiono yang menjabat sebagai Kepala Proyek Pipanisasi PT Adhi Karya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Untuk diketahui, sebelumnya I.B. Oka ditahan di Rutan Karangasem karena berkasnya lebih dahulu dilimpahkan. (kmb37)

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 3



# Ungkap Dugaan Penyelewengan PHR Mantan Kadispenda Bali dan Kadispenda Denpasar Diperiksa

Denpasar (Bali Post) -

Sehari setelah memeriksa Kadispenda Badung Adi Arnawa, tim penyidik perkara dugaan penyelewengan PHR (Pajak Hotel dan Restoran) Badung, Selasa (26/5) kemarin kembali memeriksa beberapa pejabat penting. Mereka adalah mantan Kadispenda Bali Wayan Suarjana yang saat ini sebagai Sekwan DPRD Bali dan satunya lagi Kadispenda Kota Denpasar Dewa Semadi. Keduanya diperiksa untuk memperjelas soal pembagian PHR yang diduga bermasalah.

Jaksa yang memeriksanya adalah Ketut Yasa, Suasti dan Made Tangkas. Kadispenda Denpasar Semadi yang ditanya sejumlah wartawan ketika hendak masuk ruangan jaksa penyidik, belum mau berkomentar banyak. "Saya belum bisa jelaskan," katanya.

Sementara itu, jaksa Tangkas mengatakan, pada intinya tim meminta data khususnya yang berkaitan dengan PHR. "Kan ada juga penyisihan PHR oleh Pemkot Denpasar," sebutnya.

Di pihak lain, Sekwan Bali mengaku hanya menyerahkan data. Saat di Kejati Bali,

Suarjana didampingi salah satu pegawai di Biro Hukum. "Hanya menyerahkan data," katanya sesaat setelah turun dari lantai dua Kejati Bali.

Sebelumnya, Kadispenda Badung Adi Arnawa menjalani pemeriksaan di Kejati Bali. Dia dimintai keterangan atas dugaan penyimpangan pembagian PHR Kabupaten Badung ke kabupaten/kota se-Bali. Pemeriksaan pria yang digadang-gadang sebagai bakal calon Bupati Badung tersebut memang tidak begitu lama seperti halnya pemeriksaan saksi-saksi biasanya yang berlangsung dari pagi hingga sore.

Salah seorang jaksa penyidik, Made Tangkas, membenarkan diperiksanya Kadispenda Adi Arnawa. Dia mengatakan, Adi Arnawa menyerahkan data PHR tahun 2014. Ketika ditanya mengapa pemeriksaannya cepat, Tangkas mengatakan bahwa Adi Arnawa untuk sementara tidak terlibat plafon penyeretaan PHR ke kota-kota yang mendapatkan bagian. "Tetapi nanti jika ada atau ditemukan kesaksian yang menyatakan saksi Adi Arnawa ada dalam PHR ini, kita akan panggil kembali yang bersangkutan," sebutnya. Sementara itu, Adi Arnawa yang dimintai konfirmasi *Bali Post* mengatakan dia datang ke kejaksan untuk membawa data. "Saya datang ke Kejati untuk menyerahkan data pendapatan saja. Saya serahkan dokumen (pendapatan) karena itu kan bagian saya," jelasnya. (kmb37)